

**KONDISI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP)
BAGI PETANI DI KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK
DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah Ekonomi Islam
(S.E.I) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh:

JERRI MAHENDRA
NIM. 10625003858

**PROGRAM STUDI (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

Meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Kecamatan Bunga Raya, merupakan salah satu tujuan dari program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), pengembangan usaha agribisnis pedesaan ini memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman di bidang pertanian dan peternakan. Namun macetnya usaha nasabah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) menimbulkan kredit macet yang merupakan masalah yang sangat serius dan harus cepat ditanggulangi, dan macetnya kredit bisa menyebabkan lemahnya kegiatan operasional penyaluran kredit pada PUAP. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti di PUAP ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bunga Raya di Kantor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) yang menangani program pemerintah Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Qasim Kecamatan Bunga Raya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya, untuk mengetahui apa saja faktor penyebab macetnya usaha nasabah dan upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah pada PUAP di Kecamatan Bunga Raya. Dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap kondisi PUAP di Kecamatan Bunga Raya.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus PUAP, dan nasabah/petani. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kondisi pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) bagi petani di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak di tinjau menurut ekonomi islam. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan angket dan dokumentasi. Setelah data

terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan Kualita menggunakan metode penulisan deskriptif dan deduktif.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwasannya kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). PUAP di Kecamatan Bunga Raya bisa dikatakan masih belum mencapai tujuan, karena dana PUAP yang dipinjamkan kepada petani kurang efektif artinya tidak berkembangnya usaha yang dilakukan oleh petani, dan ada juga sebagian nasabah yang mendapatkan modal dari PUAP kemudian dana tersebut tidak digunakan pada usahanya melainkan untuk keperluan lain, Macetnya usaha nasabah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) menimbulkan kredit macet yang merupakan masalah yang sangat serius dan harus cepat ditanggulangi, dan macetnya kredit bisa menyebabkan lemahnya kegiatan operasional penyaluran kredit pada PUAP.

Faktor yang menyebabkan macetnya usaha nasabah pada PUAP Kecamatan Bunga Raya adalah: Harga pasaran yang tak sesuai, efektivitas pembiayaan yang kecil, rendahnya pendapatan yang diperoleh nasabah, kesalahan manusia, nasabah yang pemalas, nasabah yang tidak jujur, nasabah sakit, gagal panen, dan bencana alam. upaya-upaya yang dilakukan pihak PUAP terhadap macetnya usaha nasabah adalah : Musyawarah I, Musyawarah II, penagihan langsung kepada nasabah, dan pemberian surat tagihan yang disetujui Kepala Balai Penyuluh Kecamatan. Dalam Ekonomi Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, oleh karena itu apabila seorang telah mendapatkan pinjaman dari pihak yang bersangkutan, berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain. Jika peninjam ini ingkar janji atau tidak menepati kewajibannya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian berarti ia telah mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Bunga Raya.....	15
B. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	16
C. Sosial dan Budaya	18
D. Sejarah Ringkas PUAP	20
E. Pola Dasar Strategi PUAP dan Kriteria Seleksi Desa	22
F. Penyusunan RUB dan Organisasi pelaksanaan PUAP	25
G. Pembinaan dan Pengendalian PUAP	29

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

vii

A. Pengertian Kredit dan Jenis-Jenis Kredit	
B. Unsur-Unsur Kredit dan Prosedur Pemberian Kredit.....	
C. Tujuan dan Syarat Pemberian Kredit.....	44
D. Kewajiban Membayar Utang dan Usaha Tani.....	49
E. Kredit dalam Ekonomi Islam.....	53

BAB IV: KONDISI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) BAGI PETANI DI KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

1. Kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya	58
2. Faktor penyebab dan upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya.....	67
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kondisi PUAP di Kecamatan Bunga Raya	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86

DAFTAR PUSTAKA87

LAMPIRAN.....89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Pada dasarnya tujuan pembangunan pertanian bukan hanya pada sektor meningkatkan produksinya saja, akan tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan gairah bertani. Kesejahteraan petani dapat ditingkatkan bila pembangunan pertanian dapat adil dan merata keseluruh daerah-daerah yang tertinggal.¹ Sektor pertanian merupakan mandat utama dalam pembangunan. Hal ini karena sektor pertanian adalah sebagai penyedia pangan yang cukup bagi penduduknya dan pendukung sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Propinsi Riau salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas, mulai dari perkebunan, pertambangan, hutan maupun hasil laut yang melimpah ruah. Semua itu bila dikelola secara maksimal akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau. Namun sebagian masyarakatnya masih tertinggal dari sisi kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan dalam menghasilkan pangan bagi kebutuhan hidup penduduk sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal penyediaan pangan ini, tidak hanya petani saja yang

¹ Krisnamukti, B, *Strategi Pengembangan dan Pembiayaan Untuk Pengurangan Kemiskinan Dipertanian*, (Bandung : PERHEPI, 2002) hal. 22

berperan, tetapi pemerintah juga harus ikut andil melalui kebijakan agar kebutuhan pangan mencukupi sehingga penduduk tidak kekurangan pangan.²

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan kemudian menjadi ketimpangan sosial. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses modal pada kegiatan ekonomi sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu, kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan structural dan kemiskinan cultural. Dengan sendirinya kita bisa memiliki cara analisis yang lain, karena masalah kemiskinan bersifat multidimensional dan bisa dilihat dari berbagai sudut.³

Kemiskinan disebut juga sebagai masalah yang multidimensional, sehingga memerlukan program penanggulangan yang dilaksanakan secara sistematis, komprehensif terpadu dan berkelanjutan. Dalam rencana strategis kemiskinan disebutkan bahwa dimensi kemiskinan mencakup 4 (empat) pokok yakni: (1). Kekurangan kesempatan, (2) Rendahnya kemampuan, (3) kurangnya jaminan dan (4) ketidakberdayaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan, sehingga jika seseorang dianggap miskin biasanya ia tidak hidup sejahtera.⁴ Mengingat kantong-kantong kemiskinan di Riau yang sebagian besar

² Elyas, Ir, Dkk, *Berkembang Bersama Rakyat Program Pemberdayaan Masyarakat Riau* (Bina Nusa : 2005)

³ Kartasasmita Ginanjar, *kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan*. Malang : Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi hal. 1-2

⁴ *Badan Penelitian dan Pengembangan* (Balitung). Propinsi Riau 2004 hal.8

berada di desa maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Desa merupakan basis terbawah dalam sistem pemerintahan, dan propinsi. jumlah penduduk lebih terkonsentrasi di pedesaan yang masih diselimuti berbagai masalah kemiskinan dan tidakberdayaan, keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan utiliti lainnya termasuk modal. Selama ini bila diperhatikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa kurang mampu menjawab tuntutan pemberdayaan, baik dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pembangunan tersebut belum melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga sistem yang dilaksanakan belum mencerminkan pembangunan yang berbasis masyarakat, di mana masyarakat cenderung sebagai objek dan bukan subjek dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu mutlak diperlukan pemberdayaan desa yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Terutama masyarakat miskin yang terpinggirkan sehingga menjadi masyarakat yang memiliki ke swadayaan dan kemandirian. Pemikiran inilah yang menjadi pertimbangan dalam penetapan desa sebagai basis dalam program pemberdayaan.

Secara umum kehidupan masyarakat pedesaan dapat kita lihat beberapa ciri kehidupan antara lain menurut *Raucek & Warren*⁵ :

1. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.

⁵ Leiho Jetta. *Sosiologi Pedesaan*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1990). Hal.3

2. Kehidupan di desa menekankan unit keluarga, artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian maupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan juga sangat ditentukan oleh kelompok primer yakni memecahkan masalah keluarga cukup memainkan peran dalam mengambil keputusan.
3. Faktor geografis sangat mempengaruhi atas kehidupan yang ada.
4. Hubungan kekeluargaan lebih erat dibandingkan dengan masyarakat kota dan juga jumlah anak dalam keluarga juga lebih banyak.

Program pemberdayaan desa pada tahun 2005 masih merupakan tahapan pilot project (proyek percobaan) dari program pemerintah. Oleh karena itu kehati-hatian dalam menentukan desa sebagai sasaran program menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting agar tercapainya tujuan secara maksimal. Ada tiga kriteria yang ditetapkan dalam menentukan desa yaitu :

1. Desa tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi.
2. Desa tersebut memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai.
3. Desa tersebut memiliki kelembagaan desa yang memadai.

Perkembangan dari program yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena dengan program tersebut masyarakat desa bisa mendapatkan bantuan modal dana untuk menjalankan usahanya.

Secara keseluruhan program pemberdayaan desa (PPD) dilaksanakan pada 48 desa yang tersebar pada 37 kecamatan di propinsi Riau. Pola pembiayaan PPD dilakukan dengan *budget sharing* antara pemerintah propinsi dengan pemerintah

kabupaten atau kota se Riau. Sejak dilaksanakan pada tahun 2005 hingga tahun 2006 sudah menyentuh sebanyak 107 desa di Riau sekitar 1400 desa. Kepala BPPM Tezzy menargetkan pada tahun 2007 jumlah desa yang mendapat bantuan dari PPD adalah lebih dari 228 desa.⁶

Pada tahun 2008 ini propinsi mengalokasikan bantuan dana Rp 27,5 milyar untuk 55 desa, Kabupaten mengalokasikan 58 milyar untuk 116 desa. Dengan demikian total bantuan dana yang tersalurkan dari propinsi mencapai Rp 205,3 milyar kepada 438 desa. Berdasarkan evaluasi 30 desember 2007 dana bergulir mencapai Rp 119.300.000.000,-dengan tingkat pengembalian sampai 80 sampai 90 persen.⁷

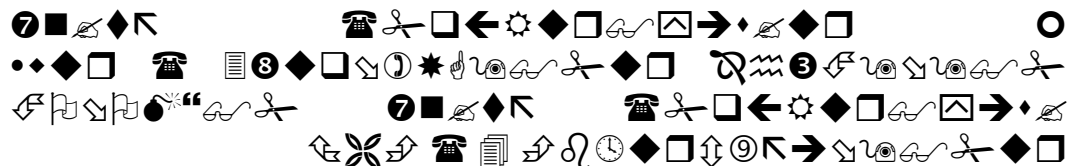
Pada dasarnya PPD adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang sifatnya bergulir berbentuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dikhususkan pada bidang pertanian. Dengan adanya PUAP tersebut masyarakat dapat menghindari pinjaman-pinjaman kepada *rentenir* yang memberikan bunga yang cukup tinggi sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembaliannya. PUAP merupakan pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pertanian, sehingga terjangkau oleh masyarakat dengan urusan yang tidak menyulitkan masyarakat.

⁶ *Riau Pos* co id

⁷ Tezzy Dacrizal dahlan, *Majalah Bang Rusli Edisi 40/ Maret 2008*.hal.7

Pinjam Meminjam (*ariyah*) dalam Islam dijelaskan adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.⁸ Sebagai salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat. Ia bisa berlaku pada masyarakat tradisional, ataupun pada masyarakat modern, oleh sebab itu jenis transaksi ini sudah ada dan dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain, mengambil manfaat sesuatu yang halal dengan tidak merusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan secara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.⁹ Tiap-tiap yang mungkin yang diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.

Firman Allah SWT :



Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Qs. Al Maidah 2).¹⁰

⁸ Sulaiman Rasid, *Fikih Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2006) h.322

⁹ H. Moh. Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2006) hal.426

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : Dipenegoro, 2006)

Memberi pinjaman hukumnya sunat, sama halnya dengan tolong menolong dalam bidang yang lain. Terkadang meminjamkan bisa menjadi wajib seperti meminjamkan kepada orang yang sangat membutuhkan atau terlantar.

Dalam hal pinjam meminjam, pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) ini memberikan pinjaman berbentuk modal untuk usaha petani. Dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Bunga Raya hanya 3 (tiga) desa yang mendapatkan bantuan modal tersebut. Desa yang mendapat bantuan dana adalah Desa Buantan Lestari, Desa Jatibaru, dan Desa Langsung Permai yang berada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Desa tersebut memiliki latar belakang dan kriteria dari program pemberdayaan desa (PPD), Kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat desa tersebut disebabkan oleh kurangnya akses pada sumber permodalan dalam pengolahan bidang pertanian. Namun modal yang diberikan kepada petani mengalami kemacetan atau kredit macet, sehingga pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) mengalami kesulitan dalam pencairan dana untuk petani yang belum mendapatkan bantuan tersebut, karena modal usaha yang diberikan atau dipinjamkan kepada petani mengalami kemacetan dalam angsurannya.¹¹

Bapak Damin warga Rw 04 Jatibaru adalah seorang petani padi yang menjadi nasabah PUAP, Bapak Damin adalah salah satu nasabah PUAP yang macet dalam angsurannya. Hal ini disebabkan usaha yang dilakukan sering kali mengalami gagal panen karena serangan hama dan penyakit, sehingga hasil yang didapat kurang menghasilkan. Terkadang dengan perolehan hasilnya tidak

¹¹ Amin Pribadi, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan (BPK), *Wawancara* 05 April 2011.

mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini yang membuat Bapak Damin sulit membayar angsurannya.¹²

Bapak Suparman warga 02 desa Langsung Permai. Bapak Suparman adalah seorang petani yang memiliki usaha ternak kambing. Dan beliau juga salah satu nasabah PUAP. Pada awalnya ternak kambing ini dipelihara tidak secara individu melainkan secara berkelompok, akan tetapi karena terjadi kecemburuan sosial dalam hal pemeliharaan. Kemudian ternak ini dibagi dan dipelihara kepada setiap anggota. Setelah dipelihara oleh masing-masing petani. Dan akhirnya banyak ternak yang tidak berkembang, sehingga petani sulit mengembalikan pinjaman.¹³

Melihat banyaknya petani/peminjam pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang macet dalam mengembalikan pinjaman ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **KONDISI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) BAGI PETANI DI KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada :

”Kondisi pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) bagi petani di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak ditinjau menurut Ekonomi Islam”.

¹² Damin, Petani Padi, *Wawancara* 06 April 2011

¹³ Suparman, Peternak Kambing, *Wawancara* 06 April 2011

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya?
2. Apa saja faktor penyebab macetnya usaha nasabah dan upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah pada PUAP di Kecamatan Bunga Raya?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kondisi PUAP di Kecamatan Bunga Raya?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab macetnya usaha nasabah dan upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah pada PUAP di Kecamatan Bunga Raya.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap kondisi PUAP di Kecamatan Bunga Raya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan penulis tentang Ekonomi Islam, khususnya tentang masalah kredit.
 - b. Sebagai wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan selama kuliah di Universitas Islam Negeri.

- c. Sebagai bahan masukan bagi penulis didalam menambah ilmu pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- d. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat dlam memperoleh gelar Sarjanah Ekonomi Islam (S.E.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bunga Raya di Kantor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) yang menangani program pemerintah Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang berada di jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Bunga Raya. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena di PUAP tersebut ada terjadi kredit macet.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek dalam penelitian ini ialah pihak pengurus Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan petani / peminjam.
2. Objek dalam penelitian ini ialah “Kondisi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bagi petani di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3 desa yang memiliki Pengurus sebanyak 9 orang, dari setiap desa mempunyai 3 orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sedangkan jumlah petani peminjam

berjumlah 118 orang. Di Desa Jatibaru berjumlah 36 orang, di Desa Langsung Permai berjumlah 31 orang, dan Desa Buntan Lestari berjumlah 51 orang. Penulis mengambil Sampel hanya pada 2 desa karena kedua desa tersebut mengalami kredit macet yaitu: Desa Jatibaru berjumlah 5 orang, dan desa Langsung Permai berjumlah 24 orang, jadi jumlah peminjam yang macet berjumlah 29 orang, dan dalam pengambilan data penulis memakai teknik Purposive Sampling.

4. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengurus dan petani.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan. Maka dengan landasan tersebut pengumpulan datanya dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian
- b. Interview atau wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

- c. Angket atau kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah, agar nasabah memberikan jawabannya.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan tulisan dalam bentuk dokumen tentang macetnya usaha nasabah pada PUAP, Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.

6. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam meneliti ini adalah Analisis Kualitatif yaitu Analisis dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, baik data yang dari lapangan maupun kepustakaan, maka data tersebut dianalisa dengan metode-metode sebagai berikut :

- 1. Metode Deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum dan kemudian dianalisis sedemikian rupa dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2. Metode Induktif, yaitu analisis data yang bersifat khusus kemudian dianalisis suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- 3. Deskripsi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengemukakan masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarah dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis karya tulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Terdiri dari : Gambaran Umum Tentang Kecamatan Bungaraya, Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk, Sosial dan Budaya, Sejarah Ringkas Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Pola dasar Dan Stratgi Pelaksanaan PUAP, Kriteria Seleksi Desa dan Gapoktan Penerima PUAP, Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB), Organisasi pelaksanaan PUAP, Pembinaan dan Pengendalian PUAP.

BAB III: Terdiri dari: Pengertian kredit, Jenis-Jenis kredit, Unsur-Unsur kredit, Prosedur Pemberian kredit, Tujuan dan Syarat pemberian kredit, Kewajiban membayar utang, Usaha Petani, Kredit dalam Ekonomi Islam.

BAB IV: Merupakan bab inti yang membahas tentang: Bagaimana kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya.

Apa saja faktor penyebab dan upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kecamatan Bunga Raya.

Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kondisi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Buanga Raya.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Bunga Raya

Kecamatan Bunga Raya memiliki 10 Desa yakni:

1. Desa Suak Merambai
2. Desa Dayang Suri
3. Desa Temusai
4. Desa Langsung Permai
5. Desa Tuah Indrapura
6. Desa Buantan Lestari
7. Desa Kemuning Muda
8. Desa Jaya Pura
9. Desa Jati Baru
10. Desa Bunga Raya

Pembentukan Kecamatan Bunga Raya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang pemekaran Kecamatan Bungaraya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan Kecamatan.

Luas Kecamatan Bunga Raya 151 KM² tingkat kesuburan tanah antara lain adalah sedang dengan sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk tanaman pangan dan perkebunan. Sedangkan topografi Kecamatan Bunga Raya

adalah datar dan rawa-rawa. Kecamatan Bunga Raya berbatasan dengan Kecamatan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sunga Apit dan Kecamatan Sungai Kecil
- Sebelah Selatan : Kecamatan Siak
- Sebelah Barat : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bengkalis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pusako

B. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Senada dengan Kecamatan lain, masalah penduduk Kecamatan Bunga Raya adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan. Penduduk Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010 berjumlah 21184 jiwa dengan jumlah 4.435 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki 11230 jiwa dan jumlah perempuan 9.954 jiwa. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bunga Raya beragam dari bertani, pedagang, pegawai negeri dan buruh.

Untuk melihat tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Bunga Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 2.1 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bunga Raya.

No	Desa	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Suak Merambai	397	349	746
2.	Dayang Suri	351	306	657
3.	Temusai	569	521	1090
4.	Langsat Permai	714	672	1386
5.	Tuah Indra Pura	1487	1220	2707
6.	Buantan Lestari	1106	993	2099
7.	Kemuning Muda	1164	1015	2179
8.	Jaya Pura	1539	1356	2895
9.	Jati Baru	1702	1570	3272
10.	Bunga Raya	2201	1952	4153
Jumlah		11230	9954	21184

Sumber : Kantor Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup akan menciptakan pengangguran.

Dibawah ini kita lihat tabel banyaknya pencari kerja di Kecamatan Bunga Raya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, seperti dibawah ini:

Tabel: 2.2. Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bunga Raya.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Tidak Tamat SD	5	-	5
2.	SD	20	11	31
3.	SLTP	100	83	183
4.	SLTA	474	312	786
5.	Program Diploma	58	16	74
6.	Program Strata	10	5	15

Sumber: Kantor Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010

C. Sosial dan Budaya

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan.

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Bunga Raya akan disajikan data tentang jumlah sarana pendidikan meliputi TK, SD, SLTP, SLTA

Tabel: 2.3. Sarana Pendidikan Kecamatan Bunga Raya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	10
2	SD	12
3	SLTP	7
4	SLTA	3
5	Perguruan Tinggi	1
Jumlah		33

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010

b. Agama

Sebagian besar penduduk Kecamatan Bunga Raya beragama islam. Tempat ibadah yang merupakan wadah dalam mengerjakan kehidupan beragama dan beramal untuk kepentingan bersama dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 2.4. Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Bunga Raya

No	Desa	Jenis Tempat Ibadah						Jumlah
		M	Mu	G P	G K	P	W	
1.	Suak Merambai	3	8	-	-	-	-	11
2.	Dayang Suri	3	7	-	-	-	-	10
3.	Temusai	3	9	-	-	-	-	12
4.	Langsat Permai	4	10	-	-	-	-	14
5.	Tuah Indrapura	4	10	-	-	-	-	14
6.	Buantan Lestari	3	6	-	-	-	-	9
7.	Kemuning Muda	3	11	-	-	-	-	14
8.	Jaya Pura	2	8	-	-	-	-	10
9.	Jati Baru	4	10	-	-	-	-	14
10.	Bunga Raya	2	9	-	-	-	-	11
Jumlah								119

Sumber: Kantor Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010

Ket: M : Masjid

Mu : Mushola

GP : Gereja protestan

GK : Gereja Katolik

P : Pura

W : Wihara

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh penduduk, dominan beragama Islam. Ini dapat dilihat dari jumlah sarana atau tempat ibadah yang terdapat di Kecamatan Bunga Raya.

c. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 tentang Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bunga Raya.

Tabel 2.5. Jumlah fasilitas kesehatan yang berada di Bunga Raya

No	Desa	Puskesmas	Poli klinik	Pustu	Apotik
1	Suak merambai	-	1	-	-
2	Dayang suri	-	1	-	-
3	Tembusai	-	1	-	-
4	Langsat permai	-	1	-	-
5	Tuah indrapura	-	1	-	-
6	Buantan lestari	-	1	-	-
7	Kemuning muda	-	1	-	-
8	Jaya pura	-	1	-	-
9	Jati baru	-	2	-	-
10	Bunga Raya	1	-	2	-
	Jumlah	1	10	2	-

Sumber: Kantor Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan bagi masyarakat sudah mencukupi dan sudah memadai hal ini dapat dilihat dari setiap desa yang ada di Kecamtan Bunga Raya masing-masing sudah memiliki puskesmas pembantu dan pustu serta satu puskesmas yang berada di ibu kota Kecamatan.¹

D. Sejarah Ringkas Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 tentang salah satu upaya Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan, dan merupakan pengembangan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu PNPM-Mandiri maka dibentuklah program lanjutan yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang diharap mampu menjadi solusi bagi masyarakat pedesaan. PUAP dalam perkembangannya memerlukan suatu

¹ Dokumen Kantor Kecamatan Bunga Raya Tahun 2010

pengkajian baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Mengkaji di sini ialah membandingkan apakah ada perkembangan antara sebelum dan sesudah adanya program PUAP. Dari sini, akan dapat dilihat apakah dengan program ini akan mengalami kemajuan atau tidak.

Adapun tujuan yang akan dicapai Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan Ekonomi petani menjadi jaring atau mitra lembaga dalam rangka akses ke permodalan.
4. Memberdayakan kelembagaan petani dan Ekonomi perdesaan untuk pengembangan.

Sasaran Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilakukan untuk petani adalah:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/ tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.
- b. Berkembangnya 10.000 Gapoktan/ poktan yang dimiliki dan dikelola petani.
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan penggarap) skala kecil, buruh tani.

- d. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, dan musiman.

E. Pola Dasar Dan Strategi Pelaksanaan PUAP

1. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani. Skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah (1) keberadaan gapoktan, (2) keberadaan penyuluh pendamping, dan penyelia mitra tani.(3) pelatihan bagi petani, pengurus gapoktan, (4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan penggarap) buruh tani dan rumah tangga tani.

2. Strategi Dasar

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan (PUAP)
- b. Optimalisasi potensi agribisnis didesa miskin dan tertinggal
- c. Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan
- d. Pendampingan bagi Gapoktan

3. Strategi Operasional

Strategi operasional pengembangan usaha agribisnis perdesaan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
 - a. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP
 - b. Rekrutmen dan pelatihan bagi penyelia mitra tani (PMT)

- c. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan
- d. Pendampingan bagi petani dan penyuluh pendamping
- 2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
 - 1. Identifikasi potensi desa
 - 2. Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan
 - 3. Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan
- 3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
 - a. Penyaluran BLM –PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan
 - b. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
- 4. Pendampingan Gapoktan dilaksanakan melalui:
 - a. Penempatan dan penugasan penyuluh pendamping di setiap Gapoktan
 - b. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.

F. Kriteria Seleksi Desa dan GAPOKTAN Penerima PUAP

Dalam hal ini PUAP juga memiliki kriteria desa yang akan mendapatkan dana bantuan.

Kriteria seleksi dan gapoktan penerima dana PUAP sebagai berikut:

A. Kriteria seleksi desa PUAP

1. Tahapan penetapan kuota desa

Penentuan kuota desa dilaksanakan di pusat oleh kelompok kerja (pokja) diidentifikasi puap. Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

(1) Data lokasi PNPM-Mandiri. (2) data potensi desa (podes). (3) data desa miskin dari BPS, (4) data desa tertinggal dari kementerian PDT, (5) data desa lokasi program lanjutan DEPTAN antara lain; P4k, Prima Tani, P4mi, Pidra, LK M-A serta desa rawan pangan. Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha dari PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan kuota tersebut pada setiap Kabupaten/kota tim PUAP pusat menyusun daftar calon desa PUAP.

B. Tahapan Penetapan Gapoktan / Poktan

1. Kepala desa/ lurah lokasi desa PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, mengusulkan calon Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten / Kota.
2. Tim Teknis Kabupaten / Kota melakukan verifikasi calon Gapoktan usulan kepala desa / Lurah untuk ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
3. Pengurus Gapoktan yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota mengisi formulir yang berisi data – data Gapoktan.
4. Bupati / Walikota mengusulkan Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Tim PUAP Pusat dengan tembusan Tim Pembina Provinsi. Berdasarkan usulan Bupati / Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan penerima BLM PUAP.

2. Kriteria Gapoktan Penerima BLM PUAP

Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan SDM yang mampu mengelola usaha Agribisnis.

- b. Mempunyai struktur Kepengurusan yang aktif.
- c. Dimiliki dan dikelola oleh petani.
- d. Dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- e. Gapoktan Apabila di desa tersebut tidak terdapat Gapoktan dan baru ada Poktan, maka Poktan tersebut dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP yang selanjutnya akan ditumbuhkan menjadi.

G. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh Gapoktan, maka Gapoktan harus menyusun terlebih dahulu Rencana Usaha Bersama (RUB) dengan kriteria:

- a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa.
- b. Dalam penyusunan RUB tersebut pun harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, seperti : 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil dan usaha lain berbasis pertanian.
- c. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh Gapoktan diverifikasi awal oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk disetujui oleh tim Teknis Kabupaten / Kota.
- d. Rencan Usaha Bersama (RUB) yang sudah disetujui selanjutnya akan dikirim bersama dengan dokumen administrasi pendukung lainnya, antara lain : 1) Perjanjian Kerjasama, 2) Nomor Rekening Gapoktan, 3) Kwitansi yang

ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, 4) Berita Acara, 5) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Tim Pembina PUAP Provinsi.

H. Organisasi Pelaksanaan PUAP

1. Tingkat Pusat

a. Tim PUAP Pusat

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PUAP.

b. Tim Pengarah

Diketahui oleh Menteri Pertanian dibantu oleh seluruh Eselon I Lingkup Departemen Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota).

c. Tim Pelaksana

Tingkat Pusat diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibantu oleh Staf khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari kepala Biro Perencana. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Tingkat Provinsi

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana .

a. Tim Pengarah

PUAP Provinsi juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Provinsi.

b. Tim Pelaksana

Dipimpin oleh salah satu kepala Dinas/ Badan lingkup pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan sekretaris adalah kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sedangkan yang menjadi anggota adalah instansi terkait lainnya. Tugas utama dari tim Pembina adalah merumuskan petunjuk pelaksanaan PUAP sesuai dengan kondisi wilayah. Mengkoordinasikan usulan Gapoktan PUAP dari kabupaten/ kota dan mengkoordinasikan serta melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP

3. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Tim Pengarah

PUAP Kabupaten / Kota juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten / Kota.

b. Tim Pelaksana

Diketuai oleh salah satu Kepala Dinas / Badan Lingkup Pertanian. Susunan organisasi Tim Teknis Kabupaten / Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang salah satunya adalah Penyelia Mitra Tani (PMT). Tugas utama dari Tim Teknis Kabupaten / Kota adalah merumuskan kebijakan umum

Pusat dan petunjuk pelaksanaan dari Provinsi. Tim Teknis Kabupaten / Kota mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP, menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan dan melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan PUAP di tingkat kecamatan dan Desa yang berkoordinasi dengan Penyelia Mitra Tani (PMT).

5. Tingkat Kecamatan

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Kecamatan, Bupati / Walikota membentuk Tim Teknis yang diketuai Camat dan dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa Lokasi PUAP sebagai anggota. Tugas Utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan PUAP di tingkat Kecamatan.

6. Tingkat Desa

Pelaksana PUAP di Tingkat Desa terdiri dari Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Kepala Desa / Lurah mengusulkan Gapoktan sebagai calon penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/ Kota.

a. Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL)

Tugas utama dari penyuluh pendamping adalah :

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian.
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis pedesaan termasuk pemasaran hasil usaha.
3. Membantu memecahkan masalah usaha petani/ kelompok tani serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan.

4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.
6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM PUAP.
7. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

b. Penyelia Mitra Tani (PMT)

Tugas utama Penyelia Mitra Tani adalah :

1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan Gapoktan
2. Melaksanakan pertemuan reguler dengan penyuluh Pendamping dan Gapoktan.
3. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya.
4. Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dan BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan.
5. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP

I. Pembinaan Dan Pengendalian PUAP

1. Pembinaan

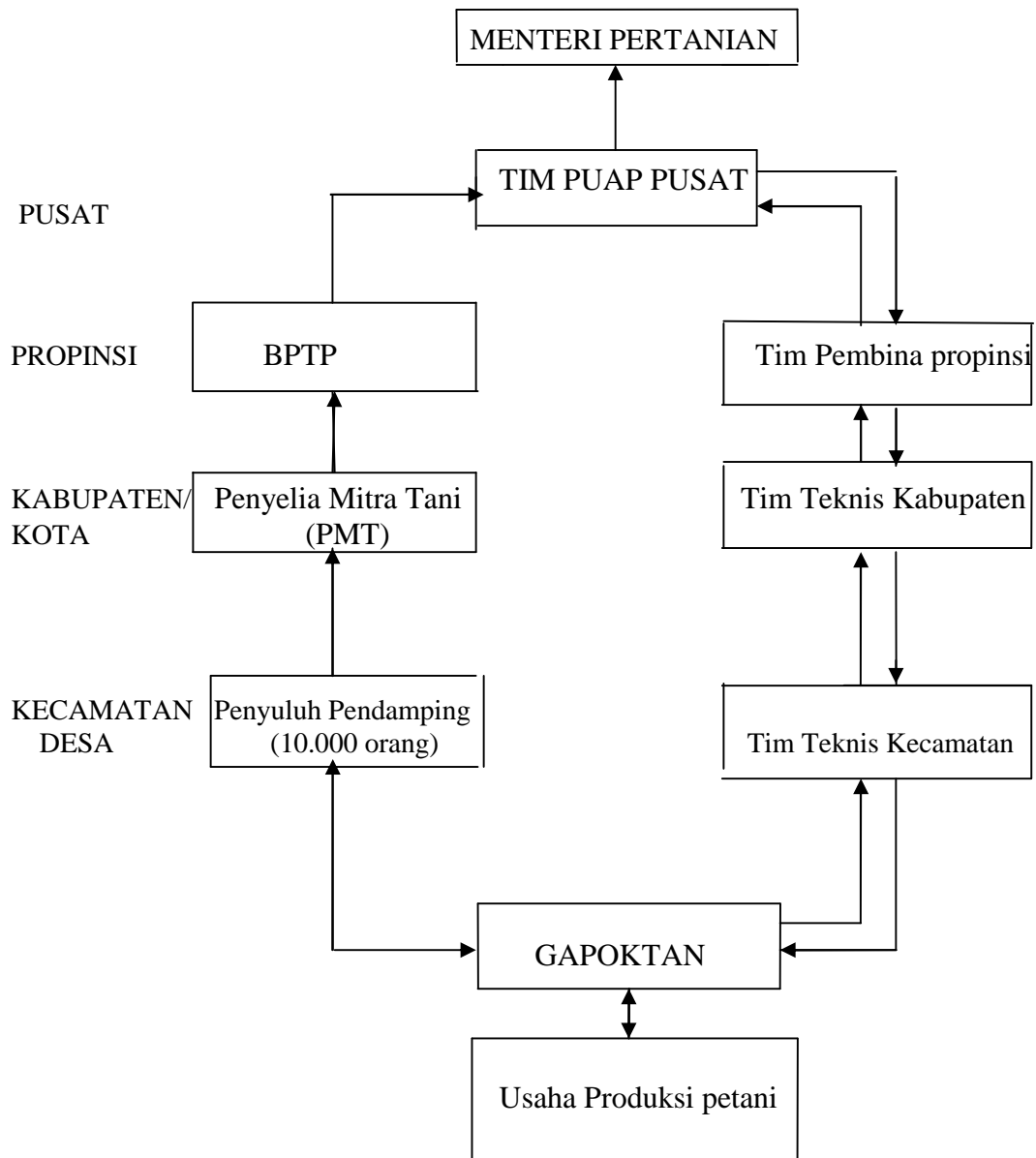
Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina Propinsi kepada tim teknis Kabupaten /Kota difokuskan kepada: 1). peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM

PUAP ditingkat kota. 2). Koordinasi dan pengendalian 3). pengembangan dan sistem laporan.

2. Pengendalian

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian mengembangkan *operation room* sebagai pusat pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh pusat data dan informasi pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola *operation room* bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola data base PUAP yang mencakup: data base GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis Gapoktan. Selain itu Pusdatin bertugas mempersiapkan bahan laporan perkembangan dan pelaksanaan PUAP. Pelaporan harus sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh tim teknis Kabupaten/Kota. Dan disamping secara regular tersebut, tim Pembina Propinsi, dan tim PUAP Pusat akan membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari laporan PNPM Mandiri.

Secara rinci alur pembinaan dan pengndalian PUAP dapat dilihat pada bagan berikut:



Tim Pusat PUAP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke Propinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP ditingkat Propinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai secretariat tim Pembina PUAP Propinsi. Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota dapat menugaskan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk menyiapkan bahan laporan. Tim Teknis Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan Reguler dan kunjungan lapangan kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.²

² Anton Apriyantono, *Lampiran Menteri Pertanian*, (Jakarta: Nomor 16/Permantan/OT/.140/2/2008, Tanggal 11 februari 2008).

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KREDIT

A. Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya kredit berasal dari bahasa latin” *kredo*” yang artinya saya percaya. Sedangkan dalam bahasa yunani kredit disebut”*Credere*” yang berarti kepercayaan.¹ Kredit yaitu berupa pinjaman atau utang yang diberikan oleh si pemberi dan si penerima kredit, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan jangka waktunya. Analisis kredit mencakup latar belakang peminjam atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Yang dimaksud dengan kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.²

“Menurut Drs.H. Melayu S.P Hasibuan, dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan*. Kredit berasal dari kata italia” *Credere*” yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan yang berasal dari kreditur bahwa anggota peminjamnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, debitur percaya bahwa kredit yang diberikan itu tidak akan macet. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang disepakati.³

Bymont P. Kent mengatakan:”kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakuakn pembayaran pada waktu yang akan

¹ H. Chilik, Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.12

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 301.

³ Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2002),hal.87

datang karena penyerahan barang-barang sekarang”.⁴ Kredit juga bisa berupa kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara penyedia dana dan peminjam atau pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan pembagian hasil keuntungan. Kredit atau suatu pemberian prestasi atau pihak atau pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan disertai dengan sesuatu kontraprestasi (balas jasa) bunga.

Kredit dalam fiqih islam berasal dari kata “*qard*” yang artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.⁵ Dan dalam fiqih islam juga dikatakan kredit/pembiayaan berasal dari kata “*Hala anil ahdi*” yang bisa disamakan dengan Al-hiwalah yang artinya terlepas dari tanggung jawab. Dan kata “*Muqashshah*” yang artinya si A mempunyai utang kepada B, sedangkan menurut istilah dianggap lunasnya utang A kepada B karena B mempunyai utang kepada A bisa dikatakan salah satu cara untuk melunasi utang.⁶ Pembiayaan “*Al-Bai Bitsaman Ajil*” yang artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan,

⁴,Chilik, Thomas Suyatno, *Op Cit*

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

⁶ *Ibid*

pembiayaan ini biasanya diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal.⁷

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam antara lain sebagai berikut:

1. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian dengan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara penyanggah dana dengan pihak lain, yang mana peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan.⁸

B. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kredit, dalam praktek dimasyarakat kredit terdiri dari berbagai jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit dikelompokkan kedalam jenis masing-masing dari berbagai segi,⁹ Pembagian jenis ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan

⁷ Karnain A, Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1992) h.38

⁸ Sukmaji, SE, Sudrajat SE, *Kredit Usaha Tani*, (Jakarta : PT. Penebar Swedaya, 1994) Cet 1

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT.raja grafindo persada, 2004), hal, 76-79 Ed.1, Cet.5,

Maksud jenis kredit ini adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan.

Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun pabrik atau proyek baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Ini dapat dibedakan kedalam 3 bagian :

a. Kredit Produktif

Kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini juga diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa, artinya kredit ini digunakan untuk usaha sehingga menghasilkan barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit ini merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang dihasilkan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.¹⁰

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun, atau paling lama satu tahun. Dan biasa digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pekebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

C. Unsur-Unsur kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Dalam pelaksanaanya, persetujuan peminjaman kredit dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas matrai. Sebagai pengamanan dari

¹⁰ *Ibid*

pinjaman maka peminjam diwajibkan menyerahkan suatu jaminan kepada yang memberikan pinjaman baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.¹¹

Biasanya pihak peminjam dalam memberikan pinjaman tidak diberikan begitu saja. Analisis kredit diberikan untuk meyakini debitur bahwa kreditur benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan debitur mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar debitur yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan artinya uang yang disalurkan pasti kembali.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Unsur Kepercayaan

yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh debitur karena sebelum dana diberikan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang kreditur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Unsur Perjanjian

Ialah pemberian kredit didasarkan adanya perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

¹¹ *Ibid*

3. Unsur Kesepakatan

Adalah suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak kreditur.

4. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian yang telah disepakati.

5. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang dikaitkan nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja membayar diakibatkan terjadi bencana alam, penyebab tidak tertagihnya disebabkan adanya suatu jangka waktu yang lama.

6. Balas Jasa

Bagi debitur balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atas jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya proveksi, dan komisi serta administrasi kredit, merupakan keuntungan utama program ini.

D. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit atau pinjaman maka dalam setiap tahap selalu dilakukan suatu penilaian yang mendalam. Apa bila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak debitur bisa meminta kembali

pinjaman yang telah diberikan atau bahkan langsung ditolak. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan suatu pinjaman oleh badan hukum, kemudian dapat juga ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya berisi keterangan tentang: Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut dengan latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.

a. Tujuan pengambilan kredit,

Dalam hal ini harus jelas apakah kredit akan menambah omset penjualan dan meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan yang lainnya.

b. Besarnya kredit dan jangka waktu.

c. Cara permohonan mengembalikan kredit.

Maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara meminjam dan mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.

d. Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akta pendirian perusahaan
- b. Bukti dari T.D.P (tanda daftar perusahaan)
- c. Tanda Daftar Perusahaan (T.D.P.)
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- e. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- f. Daftar penghasilan bagi perseoangan
- g. Kartu keluarga (KK)
- h. Data objek pembiayaan dan data jaminan.

2. Penyelidikan berkas jaminan

Penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit yang disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah mempengaruhi atau tidak.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

a. Aspek Hukum

Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan si pemohon kredit.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek ini merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang akan dibiayai ini akan diminati oleh konsumen dipasar dan bagaimana strategi pemasarannya yang dilakukan.

c. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi tahun terakhir

d. Aspek teknis

Dalam aspek ini yang dinilai adalah lokasi usaha, kemudian pelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk lay out gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjaman dalam mengelola usahanya termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya

f. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik Ekonomi maupun Sosial.

4. Wawancara

Tahapan ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas yang sesuai dan lengkap. wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan peminjam yang sebenarnya.

5. Peninjauan Kelokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan tinjauan kelokasi yang menjadi objek kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa objek yang dibiayai benar-bener sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* lapangan.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak atau tidaknya diberikan kredit, jika layak maka diberikan administrasinya.

8. Penanda Tanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon peminjam menandatangani kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau jaminan yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Setelah akad ditanda tangani maka langkah selanjutnya adalah mananda tangani surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau buku tabungan.

10. Penyaluran/ Penarikan Dana

Pencairan atau pengambialan uang dari rekening sebagai realisasi dari dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

E. Tujuan Dan Syarat-Syarat Pemberian Kredit

Dalam pemberian pinjaman kepada calon anggota peminjam, koperasi biasanya berdasarkan kepada penilaian tertentu agar pinjaman yang diberikan kepada anggota peminjam agar benar-benar berdasarkan penilaian yang tepat dan pada waktu penyelesaian dan pengembalian kredit tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada debitur yang memberikan pinjaman. Kemungkinan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan kepada peminjam.

Tujuan kredit menurut kegunaannya sebagai berikut:

1. Kredit konsumtif merupakan kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.
2. Kredit yang produktif merupakan kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, aktiva tetap. Dan kredit kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam suatu periode tertentu.

3. Kredit likuiditas merupakan kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.¹²

Dalam hal tujuan suatu lembaga yang memberikan kredit mempunyai kesamaan tujuan antara lain:

- a. Jika ditinjau dari dari segi kreditur atau pemberi kredit, pihak ini memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau bunga yang merupakan balas jasa dari kedit yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit adalah profitability principle (pinsip mencari laba).
- b. Ditinjau dari segi anggota peminjam, tujuan kredit adalah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang dan barang jasa) dengan kewajiban menggantikan pada waktu sesudahnya dengan ditambah beberapa syarat lain.
- c. Ditinjau dari segi lembaga (pemberi kredit), tujuan bagi pihak yang memberikan pinjaman kredit disamping untuk memperoleh keuntungan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani dan meningkatkan kemakmuran bersama. Dalam hal ini tujuan kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa.

Untuk menghindari ataupun untuk memperkecil resiko pinjaman yang mungkin terjadi maka permohonan pinjaman atau kredit dinilai oleh debitur atas dasar syarat tehnik yang dikenal dengan 5 (lima) C yaitu:

¹² Hendrojogi, *Azas-Azas Teori dan Praktek Koperasi* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 272

1. *Character*

Mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Untuk mengetahui karakter anggota peminjam, maka dapat diketahui peminjam:

- a. Mengenal dari dekat pribadi anggota peminjam
- b. Mengupul kererangan mengenai aktifitas caln anggota peminjam
- c. Mengupulkan keterangan dan minta dari rekan-rekannya pegawai dan saingannya mengenai reputasi kebiasaan pribadi dan pergaulan sosialnya.

2. *Capital*

Hal ini menunjukan posisi finansial atau keuangan perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh ratio finansialnya. Maka dari itu harus mengetahui pertmbangan antara jumlah barang dan modal sendiri. Untuk itu harus:

- a. Menganalisis data sedikittnya dua tahun terakhir
- b. Mengadakan analisis ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan calon penerima kredit.

3. *Capacity*

Hal ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun dibidang usahanya. Untuk itu harus diperhatikan:

1. Angka-angka hasil produksi
2. Angka-angka penjualan dan pembelian
3. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan produksinya

4. Data-data finansialnya diwaktu-waktu yang lalu tercermin dalam laporan keuangan perusahaan sehingga akan dapat diukur melaksanakan rencana kerja dimasa yang akan datang dalam hubungan dengan kredit tersebut.

4. *Condition*

Debitur harus memperhatikan kondisi ekonomi secara umum serta kondisi sektor usaha calon penerima kredit. Dalam hal ini Pengembang usaha agribisnis ini harus memperhatikan :

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan usaha anggota peminjam
2. Kondisi usaha calon anggota peminjam, perbandingan dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya.
3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam

5. *Collateral*

Collateral berarti jaminan ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan dikatakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan, untuk itu perusahaan biasanya:

- a. Meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut
- b. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya.
- c. Mengukur stabilitas dari pada nilainya

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *personality*

Yaitu menilai peminjam dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadianya di masa lalu. Menilaian ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan peminjam dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal dan loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan peminjam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha peminjam dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek kedepannya atau malah sebaliknya.

5. *Payment*

Yaitu merupakan ukuran bagaimana cara peminjam mengembalikan kredit yang telah dipinjamnya atau dari sumber mana dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan peminjam dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau malah makin meningkat, apa lagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuan adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.¹³

F. Kewajiban Membayar Utang

Setiap yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki utang kepada yang berutang. Dimana setiap utang adalah wajib dibayar, maka berdosa bagi orang yang tidak mau membayar utang dan apabila melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniyaya. Apabila kita melebihi pembayaran dari sejumlah pinjaman ini hukumnya boleh, asal saja kelebihan pembayaran itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang, adapun penambahan yang dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhitungan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Adapun piutang yang mengambil manfaatnya, maka itu adalah salah satu dari sekian cara riba.¹⁴

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- b. Pinjaman yang membawa hasil yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Dimana kita sudah mengetahui bahwa pinjaman ini penting apalagi masyarakat yang mengalami kesulitan dibidang

¹³, Kasmir *Op Cit* hal.117-120

¹⁴ Hendi Suhendi, *op cit*, h. 95-96

Ekonomi. Akan tetapi pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama hutang orang tersebut dibebaskan atau dihapuskan, apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak karena didalam islam dianjurkan apabila peminjamnya jatuh miskin maka utang wajib dihapuskan.

Adapun langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya adalah :

- a. Diberi penundaan waktu pembayaran (perjanjian jangka waktu pinjaman)
- b. Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai sedekah hal itu akan lebih baik dari yang meminjam. Pendapat diatas terdapat didalam hadis Abu Hurairah .R.A.

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A bahwa Nabi S.A.W. bersabda terdapat seorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaan) jika ia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu. Dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemiik) kerana perbutan ituah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya. (Riwayat Bukhori) “¹⁵

¹⁵ M. Nasirudin Al-Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2007), h.29, Bab 18, No hadist 980.

Apa bila pihak yang berutang sudah mampu untuk membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utang karena apabila lalai dalam pembayaran pinjaman maka pihak yang berutang telah berbuat zalim.¹⁶ hal ini terdapat didalam hadist Al-Bukhari yang berbunyi:

مطل الغنى ظلم , فإذا اتبع احدكم على ملي فليتبّع
وغير

Artinya: “Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Lalu, jika (piutang) salah seorang kalian diikutkan kepada orang yang mempunyai harta untuk melunasi, maka hendaknya ia mengikutinya”.¹⁷

G. Usaha Petani

Pada tingkat permulaan (pertama) manusia hidup secara mengembara kesana kemari mencari makan. Ia hidup dari pemberian alam yang berupa dedaunan, buah-buahan dan umbi-umbian dan lain-lain. Usaha Tani ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinirkan faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya.¹⁸

Usaha memperoleh bahan makanan dari alam seperti yang dilukiskan diatas belum dapat dinamakan pertanian karena belum disertai dengan usaha

¹⁶ *Ibid* Hendi Suhendi.

¹⁷ *Ibid* , M, Nasirudhin Al-Bani *Bab I No Hadist 1070*.

¹⁸ Anton Apriyantono, *Dokumen PUAP* (Jakarta: 2007)

penanaman, pemeliharaan, dan pengembangbiakan. Usaha tani ada tingkat tertentu masih sangat sederhana baik dari segi bentuk, corak dan pola pengolahannya.¹⁹

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani dapat kita ukur dengan berbagai jenis alat pengukur. Untuk keperluan ilmu usaha tani dapat kiranya dipergunakan jenis alat-alat pengukur sebagai berikut:

1. Azas pengolahan berdasarkan tujuan pengusahaan dan prinsip-prinsip sosial Ekonomi
2. Teknik atau alat-alat pengolahan tanah
3. Kekuasaan badan-badan kemasyarakatan atas pengolahan usaha tani
4. Kedudukan sosial Ekonomi petani sebagai pengusahaan.²⁰

Menurut E Ahnert, usaha pertanian atas dasar tujuan dan prinsip-prinsip sosial Ekonomi yang melekat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Usaha tani yang memiliki ciri-ciri Ekonomi kapitalistis.
- b. Usaha tani yang memiliki ciri-ciri dasar Ekonomi Sosialistis komonitis
- c. Usaha tani yang memiliki ciri-ciri yang telah diuraikan oleh A. Tschajnow.

Usaha tani yang memiliki ciri-ciri Ekonomi kapitalis adalah:

- a. Proses produksi dianggap sebagai perpaduan dari faktor-faktor produksi alam, tenaga manusia, modal, dan organisasi
- b. Usaha tani ditujukan kepada produksi bahan-bahan produk pertanian yang dipasarkan.

¹⁹ Kaslan A. Tahir, *Usaha Tani Indonesia*. (Jakarta: PT Asdi Maha Setya, 2005) h.1

²⁰ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2010) h.8

- c. Yang sangat Modal memiliki kedudukan yang sangat penting
- d. Produksi diajukan untuk mendapatkan keuntungan
- e. Rumah tangga pengusaha pengelola usaha pertanian sudah terpisah dari rumah tangga perusahaan.

Dalam hal usaha tani diperlukan peran penyuluh dalam pertanian erupakan sebagai Agen pembaharuan yang membantu petani mengenai masalah-masalah yang petani hadapi dan mencari jalan keluar yang diperlukan. Dengan demikian penyuluh bekrja untuk membangun masyarakat yang penting bagi pelaksana proyek.²¹

Penyuluh pendamping adalah seorang manejer yang merencanakan dan mengkoordinasi pekerjaan mereka sendiri seperti :

- a. Penyuluh sebagai pendamping petani
- b. Penyuluh pertanian sebagai organisator dan dinamisator petani
- c. Penyuluh pendamping sebagai teknis
- d. Penyuluh pendamping sebagai jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan petani.²²

H. Kredit Dalam Ekonomi Islam

Dalam Ekonomi Islam dikenal dengan pembiayaan, adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana, yang mewajibkan

²¹ Sokartawi, *Analisis Usaha Tani*, (UI-Press, 1995) h. 12-14

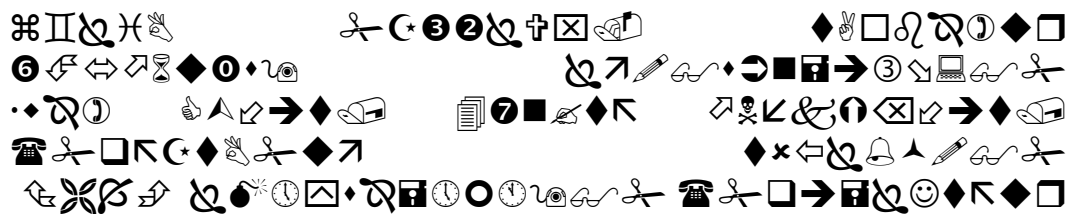
²² Suhardioyono, *Penyuluhan Pertanian*, (Jakarta: Erlanga, 1989) h.27-28

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau penagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati .

Ada beberapa pembiayaan yang dikenal dalam Ekonomi Islam antaranya:

1. Al-Musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Allah berfirman Dalam Surat Shaad : ayat 24:



Artinya : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. (Qs. Surat Shaad : ayat 24).²³

Jenis-jenis Al-Musyarakah Al akad ada tiga yaitu :

1. Syirkah Al-Inan

Syirkah al-inan adalah kontrak dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dari partisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana ataupun dalam

²³ Muhamad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 91-93, Cet.1

bagi hasil. Tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Suatu pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja, setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis Al-Musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah am'aal

Syirkah amal adalah kontrak kerja sama dua orang seproporsi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Al musyarakah ini kadang-kadang tersebut musyarakah abdan atau sanai.²⁴

2. Al-Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (sohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul

²⁴ Muhamad Safi'i Antonio, *Ibid*

atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²⁵

Jenis-jenis al- mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerja sama antara sahibul maal dan mudhorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayadah

Adalah jenis kebalikan dari mudharabah mutlaqoh, simodhorib dibatasi oleh ruang dan waktu atau tempat usaha. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si shaibul maal dalam memasuki dunia usaha.

Menurut Anwar Iqbal Quresi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan sebab menurut Quresi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.²⁶

Kredit atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1. Kredit yang tidak menghasilkan (unproduktif debt), yaitu kredit yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Kredit yang membawa hasil (income prodicing debt), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

²⁵ Muhamad Rawal Qal aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*, (Jakarta: Darun Nafs, 1985) h.95

²⁶ Anwar Iqbal Quresi, *Islam dan Teori Pembangunan Uang*, (Jakarta: Tintamas, 1985) hal.111

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis kredit atau pinjaman ini, tetapi kredit atau pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar uangnya secara dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila meminjam jatuh miskin (bangkrut) karena kredit atau pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu kredit atau pinjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggaplah sebagai sadaqah. Hal itu lebih baik bagi yang meminjamkan.

Sebagai dasar rujukan pendapat diatas akan diungkapkan dalam sebuah hadist, artinya “ diriwayatkan dari Abi Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda, terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain kredit atau pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayanannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya” (riwayat bukhori).²⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas perilaku manusia secara aktual, empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan Syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

²⁷ Ringkasan Sahih Bukhori, *Op Cit.*

BAB IV
KONDISI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP)
BAGI PETANI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Kondisi Usaha Nasabah Yang Di biayai Oleh Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya.

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikhususkan pada bidang pertanian dan peternakan, di bidang pertanian jenis usaha yang dibiayai adalah usaha padi sawah, tanaman cabe, dan palawija, dan bidang peternakan jenis usaha yang dibiayai adalah pemeliharaan ternak sapi, pemeliharaan ternak kambing, dan di bidang perdagangan seperti: penjualan hasil-hasil pertanian. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) ini bergerak dalam bidang pemberian modal usaha kepada petani dalam bentuk pinjaman, dana tersebut merupakan dana hibah yang diberikan kepada kelompok, bukan kepada individu atau pun perorangan. Dana PUAP tersebut berasal dari APBD Propinsi yang bekerjasama dengan Kabupaten Kota, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Gapoktan untuk dikembangkan pada usaha petani yang bermanfaat.¹

Pembiayaan yang diberikan oleh PUAP kepada petani di Kecamatan Bunga Raya belum mencapai tujuan atau sasaran karena dana PUAP yang dipinjamkan kepada petani kurang efektif artinya tidak berkembangnya usaha yang dilakukan oleh petani. Usaha yang dijalankan petani sering kali mengalami

¹ Amin Pribadi, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) *Wawancara* Tanggal 06 april 2011

kegagalan usaha, ataupun gagal panen, hingga menyebabkan usahanya tidak berkembang. Gagal panen ini disebabkan adanya serangan hama dan penyakit sehingga sulit untuk dikendalikan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tak tumbuh normal, keadaan dan lingkungan yang tidak mendukung, dan perawatan tanaman yang tidak memadai.² Ada sebagian petani yang dengan sengaja tidak membayar angsuran walau pun usaha yang dilakukan memperoleh hasil. Dengan macetnya usaha nasabah mengakibatkan timbulnya kredit macet yang merupakan masalah yang sangat serius dan harus cepat ditanggulangi, karena macetnya kredit pada PUAP mengakibatkan lemahnya kegiatan operasional penyaluran kredit pada PUAP.³

Dari tabel berikut dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap usaha yang dilakukan, dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel IV. 1

Jawaban responden tentang usaha
sebelum mendapat bantuan modal dari PUAP?

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Sulit meningkatkan usaha	15	51,72 %
b	Kurangnya modal	10	34,48 %
c	Rendahnya penghasilan	4	13,79 %
	Jumlah	29	100%

Sumber: data olahan angket no 1

² Ibid, Amin Pribadi.

³ Sugeng Subarjo, Penyuluh Pendamping, Wawancara Tanggal 07 April 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 15 nasabah (51,72 %) menyatakan alasan mereka kesulitan dalam meningkatkan usaha, 10 nasabah (34,48%) menyatakan alasan mereka kekurangan modal terhadap usaha yang dijalankan, dan 4 nasabah (13,79%) menyatakan alasan mereka rendahnya penghasilan nasabah yang diperoleh karena kekurangan modal.

Berdasarkan persentase di atas diketahui bahwa sebagian besar nasabah kesulitan dalam mengembangkan usaha sebelum mendapatkan pinjaman modal untuk usaha sebanyak 15 nasabah (51,72 %). Responden yang menyatakan alasan kekurangan modal dalam menjalankan usaha karena terkadang penghasilan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saja.⁴

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap alasan nasabah dalam menggunakan fasilitas kredit dari PUAP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. II

Jawaban responden tentang alasan nasabah
dalam memperoleh fasilitas kredit dari PUAP?

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Untuk mengembangkan usaha	18	62,06 %
b	Untuk modal usaha	9	31,03 %
c	Untuk konsumsi	2	6,89 %
	Jumlah	29	100 %

Sumber : data olahan angket no 2

⁴ Sagiman, Petani, Wawancara Tanggal 07 April 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 18 nasabah (62,06 %) menyatakan alasan mereka melakukan pinjaman adalah untuk memperbesar usaha, 9 nasabah (31,03%) menyatakan alasan mereka untuk membuka usaha sehingga memerlukan modal, dan 2 nasabah (6,89 %) menyatakan alasan mereka memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan persentase di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar alasan nasabah mengajukan permohonan pinjaman kepada PUAP yaitu untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, ingin dikembangkan lagi usahanya supaya lebih maju. Namun usaha yang dilakukan nasabah tidak berkembang ataupun mengalami gagal panen, karena adanya serangan hama dan penyakit sehingga sulit untuk dikendalikan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tak tumbuh normal, keadaan dan lingkungan yang tidak menguntungkan, dan perawatan tanaman yang tidak memadai.⁵

Responden yang menyatakan dana yang didapat untuk modal usaha, karena sebagian petani memiliki potensi untuk berusaha namun terkendala kepada modal. Responden yang menyatakan alasan mereka modal usaha yang didapat digunakan untuk konsumsi karena pada saat modal akan digunakan untuk usaha, nasabah mempunyai keperluan yang sangat mendesak seperti keperluan akan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari.⁶

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan tanggapan responden tentang hasil usaha yang dilakukan setelah mendapatkan bantuan modal usaha adalah sebagai berikut:

⁵ Amin Pribadi, *Ibid*.

⁶ Karsono, Petani, *Wawancara* Tanggal 08 April 2011

Tabel IV.III

Jawaban responden tentang hasil usaha yang nasabah
jalankan setelah mendapat bantuan modal usaha dari PUAP?

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Tidak ada perubahan	19	65,51 %
b	Meningkat	5	17,24 %
c	Menurun	5	17,24 %
	Jumlah	29	100 %

sumber : data olahan angket no 3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 19 nasabah (65,51 %) menyatakan alasan mereka tidak adanya perubahan terhadap usaha yang dijalankan, dan 5 nasabah (17,24%) menyatakan alasan mereka usaha yang dilakukan mengalami peningkatan, kemudian 5 nasabah (17,24%) menyatakan alasan mereka menurun terhadap hasil usaha yang dijalankan.

Berdasarkan persentase di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah setuju dengan opsi A, tidak adanya perubahan terhadap usaha yang dilakukan nasabah, dalam hal ini pembiayaan yang diberikan PUAP kurang efektif artinya pembiayaan yang diberikan oleh PUAP masih kecil sehingga penghasilan yang diperoleh nasabah tidak ada perubahan.⁷

Tabel berikut dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap keuntungan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan modal usaha, maka dapat dilihat sebagai berikut:

⁷ Amin Priyadi. *Ibid*

Tabel IV.IV

Tanggapan responden tentang keuntungan

yang diperoleh nasabah setelah mendapat bantuan modal usaha?

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Kurang dari Rp 500,000	18	62,06 %
b	Rp 500,000 – Rp1000,000	11	37,93 %
c	Rp 2000,000 – Rp5000,000	0	0
	Jumlah	29	100 %

Sumber : data olahan agket no 4

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 18 nasabah (62,06%) menyatakan alasan mereka berpenghasilan kurang dari Rp 500,000. dan 11 nasabah (37,93 %) menyatakan alasan mereka mendapatkan penghasilan lebih besar dibandingkan dengan nasabah yang setuju dengan opsi A sebesar Rp 500, 000-Rp 1000,000.

Berdasarkan persentase di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar alasan nasabah mendapatkan penghasilan kurang dari Rp 500,000, pendapatan ini sering kali dialami oleh nasabah yang mempunyai usaha bakulan yang menjual hasil pertanian sebanyak 18 nasabah (62,06%), pendapatan yang diperoleh hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Responden yang menyatakan alasan mereka penghasilan yang diperoleh antara Rp500,000-Rp1000.000 karena usaha yang nasabah jalankan memperoleh hasil namun nasabah sengaja tidak membayar

angsuran, nasabah lebih mengutamakan membayar kredit motor dibandingkan harus membayar angsuran ke PUAP.⁸

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap waktu pencairan dana kredit yang diberikan PUAP kepada petani, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV. V
Tanggapan responden tentang waktu pencairan
dana kredit yang dilakukan oleh (PUAP)

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Cepat	15	51,72%
b	Lama	9	31,03%
c	Sangat Lama	5	17,24%
	Jumlah	29	100%

Sumber data: olahan angket no 5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 15 orang (51,72%) yang mengatakan pencairan dana kredit itu cepat, sedangkan 9 orang (31,03%) menyatakan waktu pencairan kredit atau pinjaman tersebut lama dan 5 orang (17,24%) menyatakan waktu pencairan pinjaman sangat lama.

Responden yang menyatakan cepat dikarenakan pada saat pengajuan atau permohonan peminjaman kredit, PUAP mengalami surplus dana atau lancarnya angsuran pinjaman yang di pinjamkan kepada, sehingga dana dengan cepat dapat disalurkan langsung kepada petani.

⁸ Sugeng Subarjo, S.p, (Penyuluh Pendamping) *Wawancara*, Tanggal 09 April 2011

Responden yang menyatakan waktu pencairan dana lama, karena pada saat pengajuan/permohonan kredit pengurus PUAP mengalami kekurangan dana, artinya dana yang dipinjamkan kepada petani sebagian besar belum dikembalikan.

Responden yang menyatakan dalam waktu pencairan kredit sangat lama, pada saat pengajuan permohonan kredit, karena pengurus melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dilapangan dan usaha yang dilakukan, agar dana yang diberikan benar-benar untuk pengembangan usaha.⁹

Pada tabel berikut adalah menyajikan tanggapan responden terhadap pengurus PUAP melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan nasabah, sebagai berikut:

Tabel IV. VI

Tanggapan responden tentang pengawasan dari pengurus pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Sesekali	7	24,13%
b	Sering sekali	4	13,79%
c	Tidak pernah	18	48,27%
	Jumlah	29	100%

Suber: data olahan angket no 6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 orang (24,13%) menyatakan alasan mereka yang menyatakan setuju dengan opsi A, 4 orang (13,79%) menyatakan alasan mereka yang setuju dengan opsi B, dan 18 orang (48,27%) yang menyatakan alasan mereka setuju dengan opsi C,

⁹ Khairudin, Ketua Gapoktan Desa Jati Baru, *Wawancara* tanggal 21 April 2011

Dari persentase di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan opsi C tidak pernah ada pengawasan dari pihak PUAP terhadap usaha petani hanya saja sering dilakukannya penyuluhan-penyuluhan dan mengadakan pertemuan-pertemuan dalam mengatasi masalah dan kendala-kendala yang dihadapi petani dilapangan dalam usahanya yaitu 18 orang (48,27%).

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang nasabah PUAP sebagai berikut: Menurut Bapak Damin warga Rw 04 Jatibaru adalah seorang petani padi yang menjadi nasabah PUAP, Bapak Damin adalah salah satu nasabah PUAP yang macet dalam angsurannya. Hal ini disebabkan usaha yang dilakukan sering kali mengalami gagal panen karena serangan hama dan penyakit, sehingga hasil yang didapat kurang menghasilkan. Terkadang dengan perolehan hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini yang membuat Bapak Damin sulit membayar angsurannya.¹⁰ Penyebab gagal panen ini antara lain : adanya serangan hama dan penyakit sehingga sulit untuk dikendalikan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tak tumbuh normal, keadaan dan lingkungan yang tidak menguntungkan, dan perawatan tanaman yang tidak memadai.¹¹

Menurut Bapak Suparman warga 02 desa Langsung Permai. Bapak Suparman adalah seorang petani yang memiliki usaha ternak kambing. Dan beliau juga salah satu nasabah PUAP. Pada awalnya ternak kambing ini dipelihara tidak secara individu melainkan secara berkelompok, akan tetapi karena terjadi

¹⁰ Damin, Petani Padi, *Wawancara* 10 April 2011

¹¹ *Ibid*, Amin Pribadi.

kecemburuan sosial dalam hal pemeliharaan. Kemudian ternak ini dibagi dan dipelihara kepada masing-masing anggota. Dan akhirnya setelah dipelihara masing-masing, banyak ternak yang tidak berkembang, sehingga petani sulit mengembalikan pinjaman.¹²

Namun ada juga petani yang usahanya memperoleh hasil namun dengan sengaja tidak mau membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo ke PUAP, walaupun sebenarnya petani itu mampu.¹³

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit yang telah diberikan tidak dapat ditagih tepat pada waktunya sehingga menimbulkan kerugian yang harus tanggung oleh pihak PUAP.

B. Faktor Penyebab dan Upaya Mengatasi Kemacetan Usaha Nasabah Pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya.

1. Faktor Macetnya Usaha Nasabah di Kecamatan Bunga Raya

Kegiatan pemberian kredit oleh pihak Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kepada petani merupakan pembentukan asset PUAP, karena asset tersebut dikuasai oleh pihak luar yaitu petani. Karena itu pihak PUAP selalu berusaha agar dana yang telah diberikan kepada petani memang benar-benar dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang menguntungkan baik untuk petani maupun untuk PUAP itu sendiri. Pengembangan Usaha Agribisnis

¹² Suparman, Peternak, *Wawancara* Tanggal 10 April 2011

¹³ Sugeng Subarjo SP, Penyuluh Pendamping (PPL) *Wawancara* tanggal 11 April 2011

Pedesaan (PUAP) menginginkan agar resiko diminimalisasikan bahkan bila sanggup pihak PUAP berusaha untuk meniadakan resiko, akan tetapi itu jarang sekali terjadi karena masih selalu ada peminjam yang tidak mengembalikan kredit tepat pada waktunya.

Adapun dalam ketentuan atau sistem yang dilakukan dalam prosedur pemberian kredit oleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) kepada petani di desa langsung permai dan desa jatibaru adalah berbeda. Desa langsung permai dalam hasil musyawarah, pengurus PUAP memberikan pinjaman modal tanpa menggunakan jaminan, hanya dalam bentuk surat perjanjian tertulis diatas materai. Sedangkan hasil musyawarah di desa jatibaru dengan menggunakan jaminan, alasannya untuk memperkecil tingkat resiko sewaktu-waktu terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran Namun sebenarnya tidak adanya tuntutan atau arahan dari Pemerintah pusat, mengenai jaminan tersebut. pemerintah hanya menginginkan dana tersebut disalurkan untuk dikembangkan kepada petani melalui Gapoktan.¹⁴

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan macetnya usaha nasabah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), penulis melakukan wawancara langsung pada pihak pengurus PUAP, dan juga menyebarkan angket kepada petani yang mengalami kredit macet, agar didapatkan hasil yang maksimal dan optimal.

¹⁴ Sugeng Subarjo. SP,(Penyuluh Pendamping Lapangan), *Wawancara* Tanggal 11 April 2011

Adapun yang menjadi faktor penyebab macetnya usaha nasabah sehingga terjadi kredit macet pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kecamatan Bunga Raya adalah sebagai berikut:

1. Harga pasaran yang tak sesuai

Petani yang berharap pada hasil panen dengan harga yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil usaha yang petani peroleh bernilai dibawah harga pasar. Hal ini sangat menyulitkan petani dalam mengembalikan pinjaman.¹⁵

2. Efektifitas pembiayaan yang kecil

Petani yang ingin mengembangkan usahanya agar hasil usaha yang diperoleh lebih baik selalu tidak terlaksana karena minimnya modal yang didapat dari PUAP yang maksimal peminjamannya Rp 4000.000,- sehingga kurang untuk mengembangkan usahanya, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.¹⁶

3. Rendahnya pendapatan nasabah

Rendahnya pendapatan juga merupakan faktor penyebab nasabah tidak membayar angsuran, hal ini sering terjadi pada petani yang mempunyai usaha pedagang bakulan yang menjual hasil pertanian. Nasabah sering kali Pendapatan yang mereka dapat terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja, bahkan pendapatan yang mereka dapat lebih rendah dari modal yang dikeluarkan. Dengan keadaan seperti itu nasabah sulit untuk membayar angsuran.

¹⁵ Sugeng Subarjo SP, Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) Wawancara tanggal 12 April 2011

¹⁶ *ibid*

4. Kesalahan Manusia

a. Nasabah tidak jujur

1. Adanya penyalah gunakan modal yang didapat. Pinjaman modal yang petani dapat tidak digunakan untuk usahanya melainkan untuk biaya rumah tangga dan biaya sekolah anak. Hal ini membuat petani sulit untuk mengembalikan angsuran bahkan petani tersebut terlilit dengan hutang.¹⁷
2. Nasabah yang meminjam dana pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ternyata mempunyai pinjaman ditempat lain. Bahkan modal yang didapat tidak digunakan untuk pengembangan usahanya, bahkan dana tersebut digunakan untuk membayar utang yang lain.¹⁸

b. Nasabah yang lalai (pemalas)

Nasabah yang telah lama melakukan pinjaman sering kali berdiam diri atau tidak ambil tahu atas hutang kredit yang menumpuk dan ketika usahanya membuahkan hasil petani enggan mengembalikan angsuran melainkan uang tersebut digunakan untuk berjudi, membayar angsuran kredit motor, dan membeli televisi. dan keperluan lain.¹⁹

c. Karakter Nasabah berubah niat (mungkir)

¹⁷ Sarindi,Tata Usaha BPK, *Wawancara*, tanggal 12 April 2011

¹⁸ Kharudin. Ketua Gapoktan Jati baru, *Wawancara*, senin tanggal 14 April 2011

¹⁹ *Ibid*

Karakter peminjam yang bersangkutan berubah niat pada saat telah mendapatkan pinjaman dari PUAP, dimana peminjam dengan sengaja untuk tidak membayarkan kreditnya pada tanggal jatuh tempo ke PUAP, walaupun sebenarnya petani itu mampu.²⁰

d. Gagal panen

Petani peminjam menaruh harapan besar pada usaha yang dilakukan dan sekaligus sebagai sumber pengembalian utangnya, sering kali mengalami kegagalan usaha atau gagal panen seperti, tanaman padinya terkena hama dan tidak berkembangnya ternak yang dipeliharanya, hingga menyebabkan petani mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Namun dalam hal ini petani mempunyai niat untuk membayar angsuran.²¹

e. Nasabah sakit

Nasabah yang menderita sakit sehingga tidak dapat menjalankan usahanya dan akibatnya nasabah tidak mendapatkan pemasukan dana yang menyebabkan si nasabah tidak dapat membayarkan angsurannya ke PUAP.

²⁰ Sugeng Subarjo SP, Penyuluh Pendamping (PPL) *Wawancara* tanggal 15 April 2011

²¹ Ijan Kasmijan, Ketua Gapoktan Buntan Lestari *Wawancara* tanggal 16 April 2011

Ada pun nama-nama petani yang mengalami kredit macet adalah sebagai berikut :

Nama-Nama Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet Total

Desa Langsung Permai

No	Nama Peminjam	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Jangka Waktu
1	Sagiman	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
2	Sumari	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
3	Manan. K	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
4	Suprpto	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
5	Sutris	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
6	Nasimun	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
7	Karsono	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
8	M, tafsir	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
9	Ngatijo	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
10	Herman	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
11	Wanto	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
12	Sidik	Saprodi	Rp 2000.000,-	17 bulan
13	Rasmana	Saprodi	Rp 4000.000,-	17 bulan
14	Sadak	Holtikultura	Rp 4000.000,-	17 bulan
15	Meskan	Holtikultura	Rp 4000.000,-	17 bulan
16	Sahudi	Ternak	Rp 4000.000,-	17 bulan
17	Suparman	Ternak	Rp 4000.000,-	17 bulan

18	Triwahyudi	Ternak	Rp 4000.000,-	17 bulan
19	Imam, s	Ternak	Rp 4000.000,-	17 bulan
20	Abas,z	Holtikultura	Rp 4000.000,-	17 bulan
21	Suyadi	Holtikultura	Rp 2000.000,-	17 bulan
22	Dahlan	Holtikultura	Rp 4000.000,-	17 bulan
23	Suprianto	Holtikultura	Rp 4000.000,-	17 bulan
24	Tarwin	Holtikultura	Rp 4000.000,-	17 bulan

Sumber : Dokumen Gapoktan PUAP Desa Langsung Permai Tahun 2008

Nama-Nama Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet Total

Desa Jati Baru (Gapoktan Sukajadi)

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka waktu
1	Maman	Cabe	Rp 2000.000,-	18 Bulan
2	Tarigan	Jagung	Rp 4000.000,-	12 Bulan
3	Moh. Maman	Padi	Rp 2000.000,-	12 Bulan
4	Damin	Padi	Rp 3000.000,-	12 Bulan
5	Junaidi	Padi	Rp 4000.000,-	12 Bulan

Sumber : Dokumen Gapoktan PUAP Desa Jatibaru Tahun 2008

Dari tabel berikut dapat diketahui bagaimana tanggapan responden dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, dan kendala-kendala apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Maka dapat dilihat dari tabel berikut.²²

²² Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), tahun 2008-2010

Tabel IV. VII

Jawaban responden tentang cukup atau tidaknya dengan
besar pinjaman yang diberikan PUAP.

No	Alternativ Jawaban	Responden	Persentase
a	Sudah cukup	8	27,58%
b	Kurang cukup	21	72,41%
c	Lebih dari cukup	0	0
	Jumlah	29	100%

Sumber : data olahan angket no7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8 nasabah (27,58) menyatakan alasan mereka merasa sudah cukup dalam peminjaman modal, 21 nasabah (72,41%) menyatakan alasan mereka kurang cukup terhadap modal yang dipinjamkan, 0 nasabah (0%) menyatakan alasan mereka. Berdasarkan persentase diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar alasan nasabah tidak membayar angsurannya kreditnya karena kecilnya modal usaha yang diberikan oleh pihak PUAP kepada nasabah yaitu sebanyak 21 nasabah (72,41%) sehingga dengan modal sekecil itu nasabah tidak bisa mengembangkan usaha.²³

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap membayar angsuran yang telah jatuh tempo, dapat dilihat pada tabel berikut:

²³ Sugeng Subarjo SP, Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) Wawancara tanggal 16 April 2011

Tabel IV. VIII

Tanggapan responden tentang tidak membayar angsuran
yang telah jatuh tempo.

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Mengalami gagal panen	18	62,06%
b	Adanya keluarga yang sakit sehingga banyak membutuhkan biaya	6	20,68%
c	Mengalami musibah bencana alam	5	17,24%
	Jumlah	29	100%

Sumber: Data olahan angket no.8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 18 orang (62,06%) menyatakan alasan mereka tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo, adalah karena mengalami gagal panen, 6 orang (20,68%) menyatakan alasannya mereka karena adanya keluarga yang sakit sehingga banyak membutuhkan biaya, 5 orang (17,24%) menyatakan alasan mereka mengalami musibah bencana alam sehingga tidak dapat membayar angsuran yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan persentase di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar alasan petani tidak mengembalikan angsuran kredit adalah karena petani mengalami gagal panen yaitu sebanyak 18 orang (62,06%). Dalam hal ini pengurus PUAP sangat sulit memberikan pinjaman kepada petani yang belum mendapatkan pinjaman, karena modal yang dipinjamkan sebagian masih belum dikembalikan. Penyebab gagal panen ini antara lain : adanya serangan hama dan penyakit sehingga sulit untuk dikendalikan, pertumbuhan dan perkembangan

tanaman yang tak tumbuh normal, keadaan dan lingkungan yang tidak menguntungkan, dan perawatan tanaman yang tidak memadai.²⁴

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan tanggapan responden tentang pemaksaan yang dilakukan oleh pengurus PUAP berkenaan dengan macetnya angsuran nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel IV. IX

Tanggapan responden tentang

pemaksaan terhadap pembayaran kredit oleh pengurus PUAP.

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Pernah	6	20,68%
b	Tidak pernah	19	65,51%
c	Tidak memberikan jawaban	4	13,79%
	Jumlah	29	100%

Sumber: Data olahan angket no 9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 orang (20,68%) tanggapan responden tentang pihak PUAP pernah melakukan pemaksaan terhadap pengembalian pinjaman kepada petani, 19 orang (65,51%) tanggapan responden tentang pihak PUAP tidak pernah melakukan pemaksaan kepada petani, 4 orang (13,79%) yang tidak memberikan alternatif jawaban.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase yang tertinggi adalah pihak PUAP tidak pernah melakukan pemaksaan kepada petani dalam menagih utangnya, pihak pengurus PUAP selalu sopan dan baik agar hubungan petani

²⁴ , Sugeng subarjo S.p, *Ibid*

dengan PUAP selalu terjalin dengan baik. Pengurus PUAP tidak pernah memaksa petani dan tidak mempersulit petani, untuk membayar angsuran secara penuh. Bahkan jumlah angsuran setiap bulannya bisa dibayar separohnya saja, sesuai kemampuan petani membayar dan diharapkan bulan-bulan berikutnya bisa dibayar dengan secara penuh, hal ini sesuai dengan kemampuan petani membayar, tidak ada patokan dan paksaan.²⁵

Selain pengurus PUAP tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap tunggakan pembayaran angsuran, pengurus PUAP juga memberikan solusi yang ditawarkan agar dana yang dipinjamkan dapat diangsur.

Berikut adalah tabel yang menyatakan tanggapan responden terhadap solusi yang ditawarkan:

Tabel IV. X

Tanggapan responden tentang solusi yang ditawarkan oleh pihak PUAP terhadap nasabah yang mengalami tunggakan.

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
a	Menambah jangka waktu pembayaran	17	58,62%
b	Melakukan pengeawasan	3	10,34%
C	Memberikan surat peringatan	9	31,03%
	Jumlah	29	100%

Sumber : Data olahan angket no 10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 orang (58,62%) tanggapan responden tentang penambahan jangka waktu pembayaran kredit kepada pihak

²⁵ Abas, Bendahara Gapoktan Langsung Permai, Wawancara tanggal 17 April 2011

PUAP, 3 orang (10,34%) tanggapan responden tentang pihak PUAP melakukan pengeawasan terhadap petani, 9 orang (31,03%) tanggapan responden pernah melakukan surat peringatan. Mayoritas responden menjawab dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran kredit, hal ini disebabkan oleh keringanan yang diberikan oleh pengurus PUAP yang berdasarkan sistem kepercayaan.

Pengurus PUAP memberikan keringanan bagi petani yang belum membayar pada saat jatuh tempo yaitu menambah waktu pembayaran angsuran dan pengurus namun setelah jangka waktu yang diberikan telah habis, petani peminjam masih juga belum membayar angsuran, oleh karena itu pihak puap telah memberikan surat teguran yang diberikan dari rumah ke rumah dan juga penagihan namun yang didapat hanyalah omelan dari si peminjam.²⁶

Dari masalah yang telah diuraikan di atas, kita dapat mengetahui penyebab macetnya usaha nasabah, sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet.

2. Upaya-Upaya Mengatasi Kemacetan Usaha Nasabah Pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit yang telah diberikan tidak dapat ditagih tepat pada waktunya sehingga menimbulkan kerugian yang harus tanggung oleh pihak PUAP. Sepandai dan setelitinya apapun analisa kredit yang dilakukan dalam menganalisa setiap permohonan kredit

²⁶ Aprizal SP, (Penyelia Mitra Tani) *Wawancara*, 20 April 2011 Pukul 10.00 Wib

kemungkinan peminjam itu ingkar janji pasti ada. Hanya saja dalam hal ini bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilakukan pengurus PUAP dalam mengatasi kredit macet adalah:

1. Musyawarah I

Musyawarah ini di hadiri oleh Kepala Desa, pengurus PUAP, dan Petani. Musyawarah ini dilakukan pada pertengahan bulan Juli karena sebagian besar petani yang meminjam dana di PUAP belum mengembalikan pinjaman yang telah jatuh tempo. Musyawarah ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang macetnya pembayaran angsuran, dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani. Dalam musyawarah itu telah mendapat suatu kesepakatan bahwasannya petani yang macet dalam pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo diberikan penambahan waktu selama 6 bulan.²⁷

2. Musyawarah II

Setelah Penambahan waktu yang diberikan kepada petani telah habis, namun petani masih belum juga membayar angsuran. Kemudian pengurus PUAP membentuk musyawarah ke dua. Namun dalam musyawarah kedua ini gagal karena hanya beberapa orang saja yang menghadiri musyawarah tersebut. Artinya nasabah tidak memenuhi undangan dari pengurus.²⁸

3. Melakukan penagihan langsung ke nasabah

Pihak PUAP selalu sopan dalam penagihan dan memberikan keringanan dalam membayar angsuran artinya jika peminjam belum memiliki uang untuk

²⁷ Sugeng Subarjo SP, *Wawancara* Tanggal 22 April 2011

²⁸ *Ibid*

membayar angsuran secara penuh peminjam boleh membayar separoh atau sebagian saja angsuran yang dibayar sesuai kemampuan petani membayar. Namun jika peninjam sudah mampu, petani wajib membayar secara penuh sesuai dengan perjanjian.²⁹

4. Membuat surat teguran/tagihan yang diketahui Kepala Balai Penyuluh Kecamatan (BPK)

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berharap kepada nasabah agar membayar kewajibannya, jika tidak segera melunasi akan diambil tindakan. Karena dalam perjanjian ini tidak ada agunan hanya dalam bentuk kepercayaan yang ditulis diatas materai, maka bukti perjanjian tersebut akan ditidak lanjuti ke Badan hukum.³⁰

Pada awalnya pihak nasabah telah terikat dengan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak PUAP sebagai pemberi modal usaha tidak menginginkan dana yang diberikan tidak dikembangkan ke usaha yang nasabah lakukan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pemanfaatan dana perlu dilakukan agar dana yang diberikan dapat bermanfaat. Namun nasabah ingkar janji, nasabah yang memiliki ikatan perjanjian dengan pihak PUAP, tidak menepati kesepakatan awal, hal ini dapat terjadi akibat nasabah tersebut lalai ataupun sengaja tidak mengembalikan angsuran. Pada hal dalam perjanjian tersebut nasabah harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama.³¹

²⁹ Amin Pribadi Sp, *Wawancara* Tanggal 22 April 2011

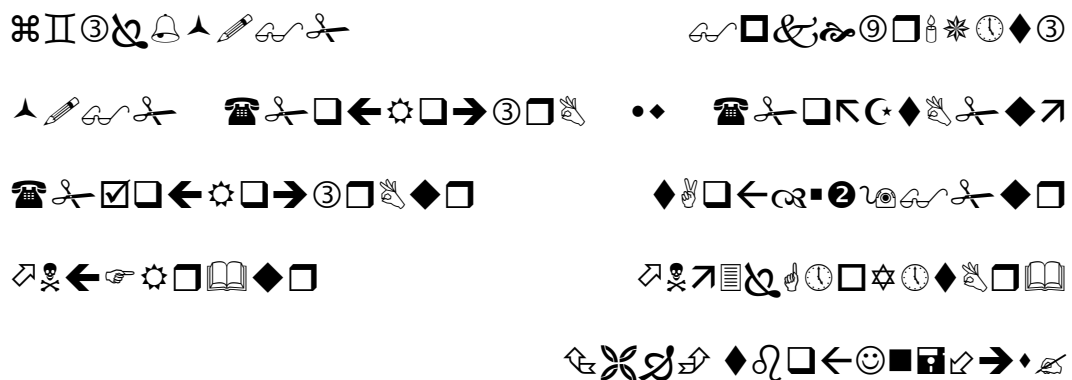
³⁰ Aprizal, SP, *Wawancara* Tanggal 23 April 2011

³¹ *Ibid*

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kondisi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya

Dalam ekonomi islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu apabila seseorang telah mendapatkan pinjaman dari pihak yang bersangkutan berarti ia telah mendapatkan amanah dari pihak lain. Jika ia mengingkari perjanjian yang telah disepakati, maka ia itu telah mengkhianati amanah yang telah dibebankan kepadanya yang hukumnya adalah dosa.

Dalam masalah mengkhianati amanah telah dipertegas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anfaal ayat 27



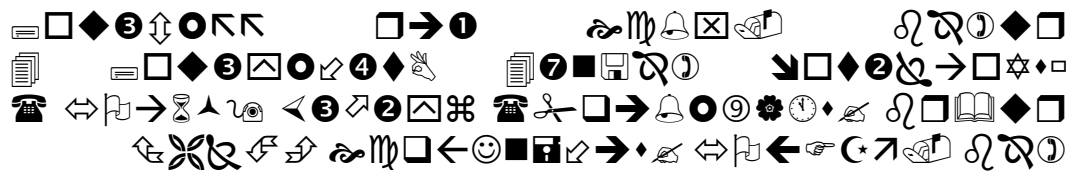
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. (Qs. Al-Anfaal ayat 27).³²

Namun jika peminjam tidak menepati janji karena keadaan memang dalam keadaan pailit atau gagal usahanya, maka pihak yang memberikan pinjaman

³² Departemen AgamaRI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, 2006), h, 70.

memberikan keringanan atau pun tempo sampai ia benar-benar mampu mengembalikan kewajibannya.

Allah Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280



Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam keadaan kesusahan maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah ayat 280).³³

Adapun ancaman terhadap orang yang berutang terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW, Raullullah SAW pernah melarang melakukan sholat jenazah terhadap orang yang meninggal dunia yang masih mempunyai utang, tetapi ia tidak mempunyai harta untuk melunasinya:

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Rasullullah SAW, melarang kami untuk mensholati orang yang meninggal dunia yang masih mempunyai utang, tetapi tidak mempunyai harta untuk membayarkannya.³⁴

Kelalaian dalam persoalan kredit yang macet maka hal tersebut harus dicarikan pengelesaian yang sesuai dan memperhitungkan itikad peminjam dan kondisi uahanya. Selain itu juga sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran dan penyelesaian yang sesuai dengan islam, dalam islam yang

³³ *Ibid*

³⁴ Rahmat Safei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV pustaka setia,2001) h.30

memberikan pinjaman tidak boleh memaksa si peminjam apalagi menuntut bunganya akan tetapi hanya boleh menuntut piutangnya saja.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa peminjam sebagai pihak penyedia dana tidak boleh memaksa kepada peminjam yang dalam keadaan susah untuk membayar utangnya apalagi dengan menggunakan kekerasan, pihak pemberi dana harus memberikan tenggang waktu kepada peminjam yang tidak mampu membayar utangnya tepat pada waktunya.

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam penanganan kredit, pihak PUAP Tidak pernah melakukan pemaksaan apalagi sampai menggunakan kekerasan dalam menangani peminjam yang tidak bisa membayar angsuran tepat ada waktunya. Yang sering dilakukan oleh pihak PUAP adalah memberikan keringanan penambahan jangka waktu pengembalian. Dengan cara ini cenderung malah membantu petani dalam pelunasan pinjaman. Selain dalam melakukan penagihan seperti yang dituliskan di atas pihak PUAP juga tidak mengenakan denda kepada peminjam yang memang benar-benar tidak mampu membayar kreditnya. Bagi petani yang mengalami kepailitan atau usahanya mengalami gagal panen, pihak PUAP hanya meminta seberapa besar petani yang bersangkutan tersebut bisa membayar.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi usaha nasabah yang dibiayai oleh Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

PUAP di Kecamatan Bunga Raya bisa dikatakan masih belum mencapai sasaran, karena dana yang dipinjamkan kepada petani tidak efektif di gunakan ke usaha nasabah sehingga usaha yang petani jalankan mengalami kegagalan, sehingga sebagian besar pinjamannya belum dikembalikan. Ada juga nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran walaupun sebenarnya nembayar. Oleh karena itu dengan macetnya usaha petani mengakibatkan timbulnya kredit macet yang merupakan masalah yang sangat serius dan harus cepat ditanggulangi, kredit macet ini terjadi dari tahun 2008 samapai 2010 yang samapai sekarang belum ada perubahan terhadap dana yang diberikan kepada petani. Macetnya kredit pada PUAP mengakibatkan lemahnya kegiatan operasional penyaluran kredit pada PUAP. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan.

2. Faktor penyebab dan upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah pada pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bunga Raya terdapat dua faktor adalah sebagai berikut:

Faktor penyebabnya macetnya usaha nasabah seperti: Harga pasaran yang tak sesuai, efektifitas pembiayaan yang kecil, rendahnya pendapatan nasabah, kesalahan Manusia, nasabah tidak jujur, nasabah yang lalai (pemalas), karakter nasabah berubah niat (mungkir), Gagal panen, nasabah sakit.

Sedangkan upaya-upaya mengatasi kemacetan usaha nasabah

Upaya-upaya yang dilakukan pengurus PUAP dalam mengatasi kredit macet adalah: Musyawarah I, Musyawarah II, Melakukan penagihan langsung ke nasabah, dan Membuat surat teguran/tagihan yang diketahui Kepala Balai Penyuluh Kecamatan (BPK)

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kondisi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi petani Kecamatan Bunga Raya.

Dalam Ekonomi Islam apabila si peminjam telah terkait perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ia tepati dan pihak peminjam harus segera menyelesaikan utangnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Islam mengajarkan untuk sedapat mungkin untuk tidak berhutang namun jika terpaksa harus berhutang maka segeralah untuk membayar dan menepati akad janji yang telah dibuat dan telah disepakati. Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi dan dapat merugikan pihak PUAP. Jika peminjam tidak menepati janji karena keadaan memang dalam keadaan pailit atau gagal usahanya, maka pihak yang memberikan pinjaman memberikan keringanan atau pun tempo samapai ia benar-benar mampu mengembalikan kewajibannya.

Allah Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesusahan maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah ayat 280).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran-saran kepada pihak PUAP Kecamatan Bunga Raya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak PUAP Kecamatan Bunga Raya agar didalam melakukan analisa kredit hendaknya harus benar-benar melakukan ketelitian dan kehati-hatian terhadap anggota yang mengajukan permohonan kredit.
2. Untuk melakukan peningkatan terhadap Ekonomi petani hendaknya pihak PUAP melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap petani yaang melakukan usaha, agar pemanfaatan dana benar-benar bermanfaat.
3. Bagi yang berminat melakukan penelitian pada objek yang sama agar meneliti faktor yang lain yang mungkin lebih mudh dan lebih falit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anton Apriyantono, *Lampiran Menteri Pertanian*, Jakarta: Nomor 16/Permantan/OT/.140/2/2008, Tanggal 11 februari 2008.
- Anwar Iqbal Quresi, *Islam dan Teori Pembangunan Uang*, Tintamas Jakarta, 1985 hal.111.
- Badan Penelitian dan Pengembangan* (Balitung: Propinsi Riau 2004) hal.8
- Elyas, Ir, Dkk, *Berkembang Bersama Rakyat Program Pemberdayaan Masyarakat Riau*, Bina Nusa : 2005.
- H. Chilik, Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- E. Moh. Rifa'I, *Fikih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendrojogi, *Azas-Azas Teori dan Praktek Koperasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karnain A, Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1992.
- Kartasasmita Ginanjar, *kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan*, Malang : Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi.
- Kaslan A. Tahir, *Usaha Tani Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Maha Setya, 2005.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT.raja grafindo persada, 2004), Ed.1, Cet.5,
- Krisnamukti, B, *Strategi Pengembangan dan Pembiayaan Untuk Pengurangan Kemiskinan Dipertanian*, Bandung : PERHEPI, 2002.
- Leiho Jetta. *Sosiologi Pedesaan*, Jogjakarta: Andi Offset, 1990.
- M. Nasirudin Al-Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2007), h.29, Bab 18, No hadist 980.

Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2002),hal.87

Muhamad Rawal Qal aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*, Jakarta: Darun Nafs, 1985.
Muhamad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 91-93, Cet.1

Rahmat Safei, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV pustaka setia,2001

Riau Pos co id

Rita Hanafie, *Pengantar Eknomi Pertanian*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2010.

Sokartawi, *Analisis Usaha Tani*, UI-Press, 1995.

Suhardioyono, *Penyuluhan Pertanian*, Jakarta: Erlanga, 1989.

Sukmaji, SE, Sudrajat SE, *Kredit Usaha Tani*, Jakarta : PT. Penebar Swedaya, 1994,Cet 1

Sulaiman Rasid, *Fikih Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2006.

Tezzy Dacrizal dahlan, *Majalah Bang Rusli Edisi 40/ Maret 2008*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pengertian Dan Defenisi
2. Daftar wawancara Kepada Pengurus PUAP
3. Daftar angket Kepada Petani
4. Surat keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Lembar Perbaikan Ujian Proposal
6. Surat Permohonan Izin Riset
7. Surat Rekomendasi Riset Pemerintah Propinsi Riau
8. Surat Rekomendasi Riset Pemerintah Kabupaten Siak
9. Surat Rekomendasi Riset dari Kecamatan Bunga Raya
10. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
11. Surat Undangan Menghadiri Ujian Munaqhasah
12. Lembaran Pengesahan Perbaikan Skripsi
13. Biografi Penulis

DAFTAR TABEL

1. Tabel II. 1 : Tentang Tingkat Kepadatan Penduduk di Kec. Bunga Raya ...	17
2. Tabel II. 2 : Tentang Jumlah Pencari Kerja di Kec. Bunga Raya	17
3. Tabel II. 3 : Tentang Sarana Pendidikan di Kec. Bunga Raya.....	18
4. Tabel II. 4 : Tentang Jumlah Rumah Ibadah menurut desa	19
5. Tabel II. 5 : Tentang Fasilitas Kesehatan di Kec. Bungaraya.....	20
6. Tabel IV.1 : Jawaban responden tentang cukup atau tidaknya dengan besar pinjaman yang diberikan PUAP	66
7. Tabel IV.2 : Tanggapan responden tentang tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo	67
8. Tabel IV.3 : Tanggapan responden tentang pemaksaan.....	70
9. Tabel IV.4 : Tanggapan responden tentang solusi yang ditawarkan	71
10. Tabel IV.5 : Tanggapan responden tentang waktu pencairan dana kredit yang dilakukan oleh (PUAP).....	72
11. Tabel IV.6 : Tanggapan responden tentang pengawasan usaha.....	74

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan modal atau dana pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan terhadap petani di Kecamatan Bungaraya?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya usaha macet pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)?
3. Bagaimana penanganan pihak Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) Dalam mengatasi kredit macet?
4. Apa saja usaha yang dilakukan petani setelah mendapatkan pinjaman?
5. Bagaimana Klasifikasi kredit terhadap permasalahan tunggakan pembayaran?
6. Bagaimana pihak PUAP melakukan peringatan / teguran kepada peminjam yang sulit melakukan pembayaran kredit.
7. Berapakah jumlah pinjaman yang paling besar diberikan oleh pengurus PUAP untuk petani?
8. Apa saja usaha yang dilakukan petani setelah mendapatkan pinjaman modal?
9. Apa saja tindakan yang dilakukan pengurus PUAP terhadap pengembangan usaha petani?
10. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pengurus PUAP dalam mengatasi kemacetan usaha nasabah pada PUAP?

KUISIONER PENELITIAN

- Isilah Kuisisioner berikut ini dengan melingkari salah satu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/I anggap paling tepat
- Kuisisioner ini digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir saya (Skripsi), karena itu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/I sangat diharapkan
- Identitas Bapak, Ibu, Saudara/I akan terjaga kerahasiaanya

STATUS RESPONDEN (ASLI)

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Agama :
Bidang Usaha Kecil/Pekerjaan :
Lama Usaha :
Alamat :

Pertanyaan :

1. Bagaimana hasil usaha yang Bapak/Ibu/ jalankan sebelum memperoleh fasilitas kredit yang diberikan oleh pengembangan usaha agibisnis pedesaan (PUAP)
 - a. Sulit meningkatkan usaha
 - b. Kurangnya modal
 - c. Usahanya tidak berkembang
2. Apa tujuan Bapak/Ibu/ Saudara memperoleh fasilitas kredit dari PUAP?
 - a. Untuk memperbesar hasil usaha
 - b. Untuk modal usaha
 - c. Untuk konsumsi

3. Bagaimana hasil usaha yang Bapak/Ibu/Saudara alankan setelah memperoleh pinjaman dari PUAP?
 - a. Meningkat
 - b. Biasa saja
 - c. Menurun
4. Berapa keuntungan yang Bapak/Ibu/Saudara peroleh setelah mendapat pinjaman dari PUAP?
 - a. kurang dari Rp 500,000
 - b. Rp 500,000-Rp 2000,000
 - c. Rp 2000,000-Rp 5000,000
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai waktu pencairan dana kredit/ pinjaman yang dilakukan oleh pengurus Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?
 - a. Cepat
 - b. Lama
 - c. Sangat lama
6. Usaha saudara mendapat pengawasan dari pihak Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Bungaraya setelah mendapatkan bantuan modal?
 - a. Sesekali
 - b. Sering sekali
 - c. Tidak pernah
7. Apakah Bapak/ Ibu/Saudara merasa cukup dengan besar pinjaman yang diberikan PUAP?
 - a. Sudah cukup
 - b. Kurang cukup
 - c. memuaskan

8. Apa yang membebani Bapak / Ibu tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo?
- a. Mengalami gagal panen
 - b. Adanya keluarga yang sakit
 - c. Mengalami musibah bencana alam
9. Apakah pihak PUAP pernah melakukan pemaksaan kepada Bapak/ Ibu terhadap pembayaran kredit?
- a. pernah
 - b. tidak pernah
 - c. tidak memberikan jawaban
10. Solusi apakah yang ditawarkan oleh pihak PUAP pada petani yang mengalami tunggakan?
- a. melakukan pengawasan
 - b. memberikan surat peringatan
 - c. menambah jangka waktu pembayaran